

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, konsep pembangunan lebih menekankan pada pembangunan manusia (Hamdiah et al., 2022). Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai proses untuk meningkatkan pilihan yang tersedia bagi penduduk melalui upaya pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai bidang pembangunan (Eks & Besuki, 2019). Manusia memegang peran penting dalam proses pembangunan karena dianggap sebagai subjek pembangunan. Hal ini berarti bahwa pembangunan dilakukan untuk kepentingan manusia dan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) (BPS, 2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menentukan tingkat pembangunan suatu daerah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS 2024).

Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selalu menunjukan tren peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai IPM Indonesia mencapai angka 73,55% dimana angka tersebut naik sebesar 0,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nilai IPM tersebut disumbang oleh tiga provinsi dengan IPM tertinggi yakni DKI Jakarta dengan IPM sebesar

82,46%, diikuti oleh DI Yogyakarta dengan IPM sebesar 81,07% dan Kalimantan Timur dengan IPM sebesar 78,20%. Sementara nilai IPM terendah berada pada Provinsi Papua yaitu sebesar 62,25%, kemudian Provinsi Papua Barat yaitu 66,66% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 66,68% (BPS Indonesia, 2024).

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat di semua provinsi, namun ketimpangan kualitas manusia masih terjadi. Kesenjangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap wilayah pasti akan berdampak pada capaian IPM secara keseluruhan. Apabila setiap provinsi/kota yang memiliki nilai IPM yang rendah tidak terus didorong untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan berbagai indikator pendukung dalam IPM, maka pencapaian nilai IPM yang tinggi di beberapa daerah tidak akan berarti bagi pembangunan secara keseluruhan di Indonesia (Jakarta Kompas, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan IPM di Indonesia.

Nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke tiga terendah secara nasional. Rendahnya IPM NTT terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang hanya sebesar 7,12 juta dan merupakan pengeluaran perkapita terendah di Indonesia. Rata-rata pendidikan di NTT menempati urutan keempat terendah di Indonesia, serta umur harapan hidup yang juga menempati urutan keenam dibandingkan provinsi lain (Mon & Tampubolon, 2020).

Berikut tabel angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2023 (Dalam Persen)

Tahun	IPM	Keterangan
2019	65,23	-
2020	65,19	Menurun
2021	65,28	Meningkat
2022	65,90	Meningkat
2023	66,68	Meningkat

Sumber : BPS Provinsi NTT 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui angka IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,06% dari tahun 2019. Kemudian memasuki tahun 2021 hingga 2023 angka IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengalami peningkatan mulai dari angka 65,28% pada tahun 2021 hingga angka 66,68% pada tahun 2023.

Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah suatu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan dan pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Firmansyah H. Ramadhan, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murzan dan Efendi (2019) mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM yaitu Anggaran belanja pemerintah sektor kesehatan, anggaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan ditambah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Adam & Nani (2022) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. sedangkan

kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadifa & Nunuk (2022) mengatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan, dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hasil yang tidak konsisten terutama mengenai pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Terbukti dari hasil penelitian diatas, terdapat peneliti yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dan ada juga yang mengatakan tidak. Hal ini tentunya menjadi celah bagi peneliti baru untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan manusia sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam proses pembangunan, mengingat manusia merupakan aset utama dalam pembangunan suatu wilayah. Setelah desentralisasi fiskal diberlakukan, pemerintah daerah sepenuhnya bertanggung jawab mengalokasikan APBD, dengan tujuan untuk memastikan pembangunan yang optimal di setiap daerah.

Pemerintah harus menyusun rencana bagi pembangunan pelayanan atas dasar prioritas.

Gambaran seberapa jauh peran pihak fasilitator dalam hal ini adalah pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan melalui kebijakan pengeluaran terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor (Beatriks S., 2020). Berikut tabel data alokasi belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 :

Tabel 1.2
Data Alokasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dalam Rupiah) Tahun 2019-2023

Tahun	Sektor Kesehatan	Sektor Pendidikan
2019	469.361.426.292	1.459.633.348.089
2020	504.689.705.690	1.686.886.861.884
2021	538.009.818.365	1.776.844.964.852
2022	571.329.931.040	1.866.803.067.819
2023	634.660.765.579	2.193.139.220.175

Sumber : Bappelitbangda Provinsi NTT, 2024.

Tabel 1.2 diatas menunjukkan perkembangan alokasi belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019-2023. Alokasi belanja pemerintah pada sektor kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp.469.361.426.292 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 sebesar Rp. 634.660.765.579. Sama halnya dengan alokasi belanja di sektor kesehatan, alokasi belanja sektor pendidikan juga terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.459.633.348.089 hingga pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.

2.193.139.220.175. Alokasi belanja pemerintah pada kedua sektor ini merupakan prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-undang Dasar No.36 tahun 2009 yang mengatur tentang anggaran kesehatan menyebutkan bahwa 5 persen dari APBN di luar gaji dana dialokasikan untuk anggaran kesehatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara minimal 10 persen dana APBN diluar gaji, dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Penelitian ini layak dilakukan dikarenakan adanya fenomena permasalahan ketimpangan kualitas manusia dan kesenjangan angka IPM di setiap provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan IPM terendah ke tiga (3), serta masih adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Gambaran Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Secara Parsial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya agar lebih menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan, serta menambah pengetahuan khususnya pada jurusan ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- b. Bagi Pembaca

Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca terkait pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.